KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Keselamatan WNI lebih utama, DPR dukung moratorium pengiriman PMI ke Timteng
Tanggal : Minggu, 26 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Keselamatan WNI Lebih Utama

DPR Dukung Moratorium Pengiriman PMI Ke Timteng

DPR setuju dengan rencana Pemerintah melakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah (Timteng). DPR menilai, moratorium ini tepat demi keselamatan warga negara di tengah konflik geopolitik global.


FOTO: TEDY RM/RM.ID

Netty Prasetiyani

ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, perlindungan terhadap PMI harus jadi prioritas utama di kondisi krisis global saat ini. Pasalnya, risiko yang dihadapi tidak hanya berupa ancaman fisik saja, melainkan juga berdampak terhadap beban psikologis.

Agar kebijakan ini efektif, Netty mengusulkan moratorium disertai langkah mitigasi komprehensif bagi calon pekerja migran. Pemerintah perlu menyiapkan alternatif penempatan di negara aman agar peluang kerja masyarakat tetap terbuka lebar.

"Agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak ekonomi lanjutan bagi para pencari kerja," ujarnya, Jumat (24/5/2026).

Selanjutnya, Netty menyoroti kesiapan Pemerintah dalam menghadapi kemungkinan eskalasi konflik di Timur Tengah. Proses evakuasi serta perlindungan bagi PMI yang masih berada di kawasan itu harus berjalan optimal. Layanan pendampingan psikologis juga perlu disediakan secara maksimal dan mudah diakses oleh seluruh pekerja.

Menurutnya, Kementerian Perlindungan PMI (P2MI) wajib terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta melibatkan DPR dalam mengambil kebijakan strategis. "Kebijakan harus tetap menjaga keseimbangan antara aspek perlindungan keamanan dan keberlanjutan ekonomi para pekerja migran Indonesia," katanya.

Senada Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari menyoroti penguatan perlindungan PMI di wilayah berisiko tinggi. Keselamatan warga negara wajib jadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Itu merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh masyarakat.

Keberadaan PMI di wilayah konflik, menurutnya, membawa risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa. Diperlukan langkah mitigasi tegas serta terukur dari Pemerintah untuk meminimalisir ancaman itu. Pekerja yang berada di lokasi bahaya memiliki tingkat kerentanan sangat besar sehingga pengamanan bagi mereka perlu diperkuat secara khusus.

Dia meminta Pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi geopolitik negara tujuan sebelum membuka akses pekerjaan. "Faktor keamanan harus dipertimbangkan secara serius dan tidak hanya terpaku pada ketersediaan peluang kerja saja," tegasnya.

Putih Sari mendorong opsi kebijakan adaptif termasuk menunda penempatan ke wilayah tidak stabil. Jika kondisi suatu negara tidak memungkinkan, maka proses pengiriman tenaga kerja harus dihentikan sementara. Keselamatan nyawa para pekerja migran merupakan hal utama yang tidak bisa ditawar dalam kondisi apapun.

Selain itu, Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah konkret bagi PMI yang saat ini berada di zona bahaya. Opsi pemulangan atau evakuasi bertahap perlu disiapkan apabila situasi di lapangan semakin memburuk. Negara harus hadir memikirkan nasib warga yang sudah terlanjur bekerja di tengah kondisi.

Langkah evakuasi itu juga harus didukung koordinasi kuat lintas kementerian, lembaga, serta perwakilan Indonesia di luar negeri. Sinergi antar instansi bertujuan agar proses penyelamatan berjalan cepat juga efektif. "Kehadiran negara sangat dinanti untuk memberikan rasa aman bagi warga saat terjadi situasi darurat yang mengancam," ucapnya.

Menteri P2MI Mukhtarudin sebelumnya mengungkapkan, Pemerintah berpeluang menghentikan sementara penempatan PMI di daerah konflik menyusul adanya eskalasi ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Selanjutnya, Pemerintah juga tengah membahas alternatif kebijakan larangan penempatan untuk merespons perkembangan situasi konflik di Timur Tengah.

Mukhtarudin menyebut, kebijakan itu akan diambil apabila keadaan sudah sangat memaksa di lapangan. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan kondisi nyata serta hasil koordinasi dengan instansi terkait. "Sebelum secara resmi menerapkan moratorium penempatan, tentunya kami akan berkonsultasi intensif bersama Kemlu dan Komisi IX DPR," terangnya. ■ PYB